

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

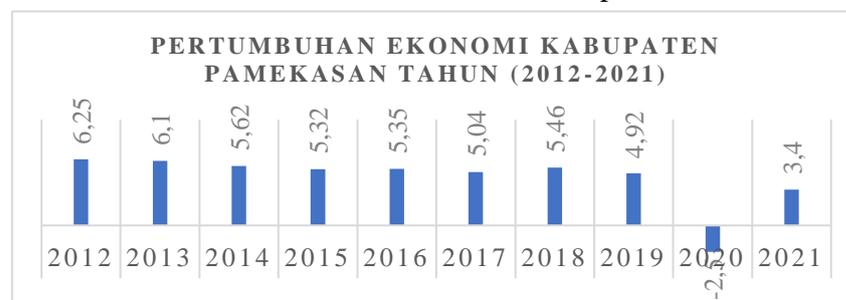
Pembangunan ekonomi adalah rangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. (TriWidodo,2006). Kegiatan pembangunan ekonomi dapat berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita masyarakat daerah dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan pada perekonomian masyarakat yang biasanya ditunjukkan oleh perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan dalam mengukur berapa besar kemampuan suatu negara memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan, perubahan faktor-faktor produksi tersebut berdampak pada naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Ada unsur ekonomi dan non ekonomi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan ukuran produksi merupakan beberapa factor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Masalah sosial, politik, dan administrasi adalah contoh factor non ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, sektor pemerintah sangatlah

penting. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran.

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat. Program-program pengeluaran dan pendapatan negara dapat mempermudah pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi atau dapat menekan tingkat pertumbuhan tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Maria Sisilia, Harsono 2021).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan



Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan 2022 (data diolah)

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan di Tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi. Di tahun 2012 kabupaten Pamekasan di angka 6,25%. Di tahun 2013 kabupaten Pamekasan berada di angka 6,1%. Selanjutnya di tahun 2014 kabupaten Pamekasan mengalami penurunan berada di angka 5,62%. Pada tahun 2015 kabupaten pamekasan mengalami penurunan di angka 5,32%. Pada tahun 2016 kabupaten pamekasan mengalami peningkatan di angka 5,35% kemudian pada tahun 2017 kabupaten pamekasan mengalami penurunan di angka 5,04% selanjutnya pada tahun 2018 kabupaten pamekasan mengalami peningkatan di angka 5,46% namun pada tahun 2019 kabupaten pamekasan mengalami penurunan di angka 4,92%. Tahun 2020 kabupaten pamekasan mengalami penurunan drastis pada pertumbuhan ekonominya di angka 2,5%. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya *pandemic Covid-19* yang menyebar luas di seluruh Indonesia khususnya pulau jawa. Dari fenomena tersebut maka kabupaten pamekasan mengalami kontraksi terhadap pertumbuhan ekonominya. kemudian pada tahun 2021 dalam kondisi covid dengan kebijakan *New Normal* yang diberlakukan membawa perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten pamekasan dimana mengalami peningkatan diangka 3,4%.

Untuk mengatasi setiap masalah pertumbuhan ekonomi otonomi daerah memiliki kekuasaan masing-masing dalam meningkatkan dan mengembangkan potensinya, adanya transformasi otonomi daerah yang terdapat pada UU no 22 tahun 1999 mengenai asas desentralisasi, otonomi daerah memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur kepentingan rakyatnya sesuai dengan peraturan yang

berlaku di daerahnya. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di daerahnya. Pendapatan suatu daerah digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian tersebut.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, semua hak yang dimiliki oleh daerah dianggap sebagai sumber pendapatan daerah dan dimasukkan ke dalam nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah dana yang diperoleh Daerah dan dihimpun sesuai dengan Peraturan Daerah. Salah satu pendapatan daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Diharapkan dengan meningkatkan PAD, suatu daerah akan lebih mampu berinvestasi dalam pembangunan ekonominya dan memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi. (Donna Indrayanti, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang berfungsi sebagai standar atau cerminan daerah dalam mengukur tingkat kemandirian daerah. Penerimaan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut undang-undang pemerintah daerah, setiap daerah memiliki aturan sendiri untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Melalui pendapatan asli daerah pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur public serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap public. karena adanya pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan public dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, PAD menjadi salah satu tolak ukur utama peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan daerah pada uang transfer yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri. Semakin sedikit daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, semakin tinggi pendapatan asli daerah tersebut (Rinaldi, 2016). Pendapatan Asli pada Kabupaten Pamekasan masih tergolong rendah meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa sektor yang belum berkontribusi secara maksimal dalam pendapatan asli daerah, sehingga masih perlu peningkatan dalam menggali potensi yang ada di kabupaten Pamekasan yang dapat dijadikan sebagai sumber meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan guna memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya berdasarkan kondisi asas desentralisasi otonomi daerah. Meski tumbuh setiap tahun, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Pulau Madura masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa sektor yang belum berkontribusi secara maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah, sehingga masih perlu peningkatan dalam menggali potensi yang ada di kabupaten pamekasan yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (Farhan Kresna Pramudya, 2021).

Setiap daerah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal saat ini.

DAU merupakan salah satu dana perimbangan pemerintah, dan alokasinya dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan dari pendapatan APBN dengan maksud untuk mendistribusikan sumber keuangan antar daerah secara merata guna memenuhi kebutuhan pendanaan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum bertujuan untuk mencapai pemerataan sumber daya keuangan masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pengalokasian DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan keuangan antar daerah akan semakin berkurang.

DAU merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dengan bersifat block grant dan kewenangan dalam penggunaannya dilimpahkan seluruhnya pada pemerintah daerah tersebut untuk mencapai penyelenggaraan otonomi daerah (Maria Sisilia, Harsono. 2021). DAU memiliki fungsi penting dalam menciptakan keadilan dan pemerataan di berbagai bidang, dan juga dengan memiliki peran strategis yang dapat memberikan makna otonomi yang lebih bermakna.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah uang yang berasal dari penerimaan APBN dan disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka membantu pembiayaan kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan daerah yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, khususnya penciptaan kegiatan unik, adalah Dana Alokasi unik. Karena DAK

berperan dalam pembangunan daerah, khususnya kegiatan khusus dan kegiatan pembangunan fisik, maka pada saat DAK menurun maka belanja modal akan menurun dan sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka akan berpengaruh pada perkembangan pembangunan daerah.

Pada data yang telah di peroleh Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun pada 2 tahun terakhir. Sehingga dapat diketahui bahwa sumber pendapatan kabupaten Pamekasan belum maksimal dalam pengalokasiannya yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat dan beberapa wilayah terkesan menjadi daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut berpengaruh pada kelayakan kabupaten Pamekasan untuk dimekarkan menjadi dua wilayah; kota dan kabupaten.

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di Pulau Madura. Kelayakan tersebut disebabkan oleh factor penting dalam pemekaran wilayah yaitu (1) selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan; (2) laju pertumbuhan pembangunan Madura lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim. Sehingga hal tersebut yang menjadikan kegagalan dalam melakukan pemekaran kabupaten Pamekasan untuk memenuhi syarat dasar kapasitas daerah (Kutsiyah et.al., 2022).

Berdasarkan peneltian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019”. Diperoleh hasil bahwa variabel PAD (X1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. variabel DAK (X2) berpengaruh signifikan terhadap perumbuhan

ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. variabel DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. (Maria Sisilia, Harsono 2021) Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Maria Sisilia, Harsono karena lokasi penelitiannya yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Maka Peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pamekasan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian melakukan pengumpulan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan.
2. Dalam penelitian ini akan dilakukan pencarian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian mampu menjadikan bahan pertimbangan, dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menentukan arah kebijakan fiskal.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber dan referensi informasi bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.